

ANALISIS MEKANISME PENGKOORDINASIAN BANTUAN GEMPA KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

¹Anhal Mulya Perkasa

¹Sivitas Akademika IPDN Kampus Sumatera Barat
anhalmalay14@gmail.com

KEYWORDS

Koordinasi
Perencanaan
Pengorganisasian
Staffing
Directing
Controlling

KATA KUNCI

Koordinasi
Perencanaan
Pengorganisasian
Staffing, directing
Pengawasan.

ABSTRACT

The aim of the research is analyzing the mechanism of earthquake aid distribution coordination inter agencies. According Dadan et.al (1997) the concept of every process in management is coordination in planning, coordination in organization, coordination in staffing, coordination in directing and coordination in supervision. The method that used in this study is descriptive methods, the determination of informants was carried out using techniques purposive sampling. The findings in the field the authors present in the form analytical descriptive writing with data reduction in the hope of being able to provide a picture that approaches reality. Coordination of distribution of earthquake aid in the city of Padang to date not optimal and considered slow in acting. Therefore, the government needs to review and evaluate implementation of disaster management especially in the coordination method done so far. Therefore, in the future it is expected that disaster management can be better.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah ingin menganalisis mekanisme pengkoordinasian bantuan gempa Antar Lembaga Dalam Hal Penanganan Dan Penyaluran Bantuan Gempa Kepada Masyarakat Di Kota Padang. Konsep yang digunakan menurut Dadan et.al (1997) dalam setiap tahapan proses manajemen yaitu Koordinasi dalam Perencanaan, Koordinasi dalam Pengorganisasian, Koordinasi dalam Staffing, Koordinasi dalam directing, Koordinasi dalam Pengawasan. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Temuan di lapangan penulis sajikan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis dengan reduksi data dengan harapan dapat memberikan gambaran yang mendekati realitas. Koordinasi penyaluran bantuan gempa di kota Padang hingga saat ini belum optimal dan dinilai lamban dalam bertindak. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen bencana terutama pada metode koordinasi yang dilakukan selama ini. Dengan demikian, pada masa yang akan datang diharapkan penanganan bencana dapat lebih baik.

1. Pendahuluan

Koordinasi dan kerjasama antar semua stakeholder terkait menjadi masalah penting dalam manajemen bencana. Hadirnya PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, membuka perspektif baru bagi Pemerintah Daerah untuk mengusahakan bentuk kerjasama yang efektif, usaha yang selama ini banyak dikesampingkan dalam pola manajemen penanggulangan sebuah bencana. Untuk itu didalam pola manajemen bencana tersebut memerlukan suatu koordinasi yang matang antar stakeholders terkait dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu.

Pada 30 September 2009 pukul 17.16 WIB, gempa dengan kekuatan 7,6 skala richter mengguncang kabupaten Padang Pariaman. Gempa itu memporak – porandakan sebagian wilayah Sumatera Barat. Bahkan, Ibu Kota Sumatera Barat, Kota Padang lumpuh dan hancur berantakan. Data menunjukkan Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan dua lokasi dengan korban terbanyak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi mengacu pada data BMKG, pusat Gempa Bumi terjadi di 0.72o LS dan 99.94o BT dengan kedalaman 110 km. Situasi Kota Padang terasa sangat mencekam sesaat setelah gempa 7,6 SR mengguncang Kota

Padang dan sekitarnya. Ratusan rumah dan bangunan bertingkat di Kota Padang runtuh. Listrik padam dan kebakaran terjadi di mana-mana. Jaringan internet terputus dan jalur komunikasi via seluler sebagian tak bisa digunakan. Dampak yang ditimbulkan dari musibah tersebut sungguh luar biasa dilihat dari berbagai aspek. Dari aspek perumahan, ratusan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal karena hancurnya rumah-rumah mereka. Data final dari Satkorlak PB Prov. Sumatera Barat per tanggal 21 Oktober 2009 pukul 20.00 WIB dikatakan bahwa korban meninggal dunia pascagempa Sumatera Barat berjumlah 1.117 orang, korban luka berat 1.214 orang dan luka ringan 1.688 orang, dinyatakan hilang 2 orang. Bangunan rumah yang rusak berat (RB) 135.448 unit, Rusak Sedang (RS), 65.380 unit, Rusak Ringan (RR) 78.604 unit. Sarana Pendidikan 2.164 unit RB, 1.447 unit RS, dan 1.137 unit RR. Bangunan kantor 254 unit RB, 83 unit RS, dan 105 unit RR. Sarana Kesehatan 51 unit RB, 50 unit RS, dan 52 unit RR. Tempat ibadah 1.003 unit RB, 1.199 unit RS, dan 649 RR. Jalan 178 ruas RB, 63 ruas RS dan 51 ruas RR. Jembatan 21 unit RB, 30 unit RS dan 17 unit RR. Irigasi 147 unit RB, 144 unit RS, dan 27 unit RR. Dan di kota Padang, dari 11 Kecamatan yang ada, 4 Kecamatan terkena dampak gempa paling parah, yakni

Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan, dan Kuranji .

Selanjutnya penyelenggaraan penanggulangan bencana mendasarkan pada Peraturan pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk lembaga pemerintah non departemen yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disingkat dengan BNPB yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan di tingkat Nasional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan, dan untuk melaksanakan hal serupa dalam hal melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan di tingkat daerah dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat dengan BPBD baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota. Dalam hal pendistribusian bantuan bencana gempa Sumatera Barat di Kota Padang, BPBD Kota Padang sebagai yang bertanggung jawab sebagai koordinator dalam hal tersebut tentu tidak dapat berjalan sendiri dan untuk itu harus dapat berkoordinasi dengan baik dengan seluruh stakeholders yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa bumi ini sehingga segala kegiatan yang menyangkut dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa di Kota Padang dapat berjalan lancar, cepat dan tepat sasaran terutama dalam hal pendistribusian bantuan gempa kepada masyarakat.

Namun yang terlihat dilapangan pada pasca bencana masyarakat korban bencana mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Seharusnya pemberian bantuan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan terkoordinir dengan baik sehingga bantuan tidak menumpuk di gudang saja dan dilakukan penyaluran bantuan gempa tersebut dengan memperhatikan azas pemerataan dan keadilan. Bila tidak justru akan dikuatirkan akan memperparah kondisi sosial dan psikologi bagi masyarakat. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat tidak meratanya pemberian bantuan, antara lain adalah akan munculnya konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh keputusan yang kurang tepat atau yang dirasakan kurang adil oleh masyarakat. Misalnya pemberian bantuan yang berbeda, serta pertentangan kepentingan. Akibat lain yang mungkin akan terjadi adalah adanya pihak – pihak lain yang akan mengambil keuntungan serta memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi/golongan. Contohnya percaloan, intimidasi dan lain sebagainya dengan mengatasnamakan masyarakat korban bencana.

Dari permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas mengindikasikan bahwa manajemen bencana di Kota Padang berjalan dengan buruk. Melihat permasalahan yang dihadapi sangat rumit dan luas, maka didalam penelitian ini peneliti akan membatasi ruang lingkup dengan hanya meneliti di dua Kecamatan Kota Padang, yaitu Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang barat. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi penanganan dan pemberian bantuan gempa oleh Pemerintah

Kota Padang melalui BPBD Kota Padang khususnya mengenai kegiatan pendistribusian bantuan pangan, tempat hunian dan pelayanan medis/kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat, Kota Padang selama masa tanggap darurat (satu bulan pertama) Gempa Bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang terkait penyaluran bantuan gempa Sumatera Barat Di Kota Padang.

1.1 Konsep Manajemen Bencana

Manajemen penanganan bencana merupakan rancangan kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk: (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur. Dengan demikian kegiatan manajemen bencana dapat dibagi kedalam dua kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat menyangkut kegiatan pendataan kerusakan, penyediaan tenda pengungsian, menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan selama berada di tenda pengungsian, pelayanan kesehatan bagi korban gempa serta penyaluran bantuan kemanusiaan;
2. Kegiatan pasca bencana yang mencakup pelaksanaan prioritas program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat gempa.

1.2 Tanggap Darurat (*emergency response*)

Tanggap darurat merupakan semua tindakan yang segera dilakukan pada saat bencana terjadi (Carter, 1991:245). Dapat dikatakan merupakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk penyelamatan korban, perlindungan harta benda, dan juga tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penaksiran/penilaian kerusakan dan dampak negatif lainnya yang disebabkan oleh bencana. Tujuannya secara umum adalah untuk meminimalkan korban baik jiwa maupun harta benda. Menurut Dr. Mazhar Ali Sobri (Goel, 2006:xvii) tanggap darurat adalah kegiatan untuk menyelamatkan kehidupan, properti dan untuk mengurangi penderitaan korban. Selain itu tanggap darurat adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum rehabilitasi dilaksanakan. Berdasarkan teori Carter tersebut, maka dalam penelitian ini, kegiatan-kegiatan tanggap darurat yang akan dianalisis disesuaikan dengan standar minimum dalam tanggap darurat bencana yaitu bantuan pangan, penampungan (shelter)/tempat hunian serta bantuan pelayanan kesehatan.

1.3 Mekanisme Koordinasi Dalam Manajemen Bencana Pada masa Tanggap Darurat

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dijalankan menjadi suatu manajemen bencana pada fase tanggap darurat memakai teknik koordinasi dengan pendekatan proses manajemen karena peranannya sebagai fungsi yang

mengintegrasikan seluruh proses organisasi maka koordinasi perlu dilakukan dalam setiap tahapan proses manajemen. Hal ini diperlukan karena setiap tahapan proses manajemen tentu memerlukan keterpaduan peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses dalam proses manajemen. Dengan kata lain, koordinasi merupakan esensi manajemen dan secara implisit terkandung dalam fungsi-fungsi manajemen. Sehingga teknik koordinasi yang dapat dipakai dalam tahapan proses manajemen bencana pada fase tanggap darurat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Koordinasi dalam Perencanaan.

Koordinasi dalam perencanaan merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan melalui diskusi yang saling menguntungkan, tukar pikiran. Dalam melakukan perencanaan terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan adanya koordinasi yang baik antara unit – unit yang terdapat pada pemerintahan maupun non pemerintah untuk melakukan kerjasama secara menyeluruh (dinamis) dan terpadu (harmonis) untuk efisiensi dan efektivitas penanggulangan dan penanganan bencana. Koordinasi pada prinsipnya adalah memadukan kewenangan dan kemampuan untuk tindakan yang selaras dalam pencapaian bersama (Mirza, 2007:55).

1.3.2 Koordinasi dalam Pengorganisasian.

Koordinasi merupakan esensi organisasi. Koordinasi dalam pengorganisasian sangat diperlukan manajemen antara lain dalam distribusi tugas. Untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam suatu instansi maka dibentuk satu tim yang bertanggung jawab penuh atas penanggulangan bencana tersebut sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang. Dan dalam tim tersebut ditetapkan beberapa sub-tim yang diberi masing-masing tugas untuk mempersiapkan konsep spesifik, misalnya: sub-tim keuangan, sub-tim sumber daya manusia, sub-tim pendistribusian bantuan dan sebagainya. Lebih lanjut bahwa kebutuhan koordinasi meliputi kebutuhan akan efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang terbatas dan untuk menghindari pemborosan dengan maksud menghindari konflik dalam pencapaian tujuan dan mencapai keselarasan kebijakan tingkat operasional.

1.3.3 Koordinasi dalam staffing.

Dalam penempatan pegawai perlu dilakukan koordinasi untuk menjamin pegawai yang tepat di tempat yang tepat (*the right man on the right place*). Pada pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana diperlukan tenaga-tenaga atau sumber daya manusia yang profesional dalam hal tersebut pada masing-masing bidang tugas yang diembankan kepadanya sehingga koordinasi yang dilakukan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana dapat tersambung dengan baik dan kegiatan dapat dimaksimalkan.

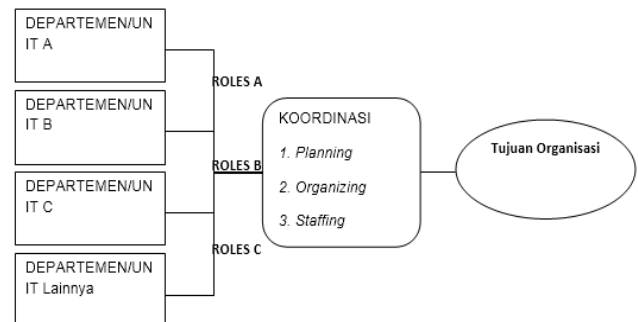
1.3.4 Koordinasi dalam Directing

Efektivitas arahan, instruksi dan pedoman sangat bergantung pada harmonisasi koordinasi Instansi pusat ke Provinsi dan Provinsi ke Kabupaten/Kota. Dalam tahapan tanggap darurat khususnya koordinasi merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi, situasi yang tak menentu dan masyarakat bingung harus berbuat apa dan bergerak sendiri-sendiri menyelamatkan diri ataupun keluarganya dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Pada situasi inilah, Pemerintah harus dapat menempatkan diri sebagai pengarah sekaligus pemimpin koordinasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan perencanaan yang telah disusun. Pada konteks ini pemerintah memberikan arahan ke mana instansi yang diarahkan yaitu melalui BNPB Pusat, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota untuk saling mendukung tugas, pokok dan fungsi pemerintah dalam hal menyelamatkan dan pengurangan resiko bencana pada warganya.

1.3.5 Koordinasi dalam Pengawasan (Controlling)

Koordinasi melalui pengawasan diperlukan untuk menjamin sinkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang distandarkan. Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan – tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya (Siagian, 1996:167).

Dan lebih lanjut gambar dari sistem koordinasi dalam tahapan proses manajemen bencana pada fase tanggap darurat yaitu :



Gambar 1. Sistem Koordinasi

Dari gambar 2.1 sistem koordinasi diatas, dapat dijelaskan bahwa Organisasi dalam bentuk apapun esensinya terdiri dari sumber daya, proses manajemen dan tujuan organisasi. Seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut dimanfaatkan dalam proses manajemen secara terintegrasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses integrasi sumber daya maupun proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut disebut dengan proses koordinasi. Dengan demikian, koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan, begitu juga pada setiap instansi ataupun organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Setiap organisasi ataupun instansi yang terkait pada penanggulangan bencana didalam memadukan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi penderitaan masyarakat pada masa tanggap darurat bencana maka digunakan teknik-teknik koordinasi dalam perencanaan, koordinasi dalam pengorganisasian, koordinasi dalam staffing, koordinasi dalam directing, koordinasi dalam pengawasan yang mana pelaksanaan koordinasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat dilaksanakan penelitian (Arikunto, 2005). Pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005), pendekatan kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah, BPBD Kota Padang, Pemerintah Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat/ NGO/ Donor, dan Masyarakat korban gempa itu sendiri. Informan penelitian yang diambil adalah perwakilan masing-masing pihak yang terlibat.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini didasarkan bahwa dalam teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia adalah seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008). Adapun yang ditetapkan sebagai informan adalah Camat dan aparat Kecamatan Padang Utara dan Padang Barat (10 Orang), Aparat Kantor Lurah di dua Kecamatan (10 Orang), Kepala BPBD Kota Padang, Masyarakat Penerima bantuan serta pendonor dan LSM/NGO lain yang menyerahkan bantuan.

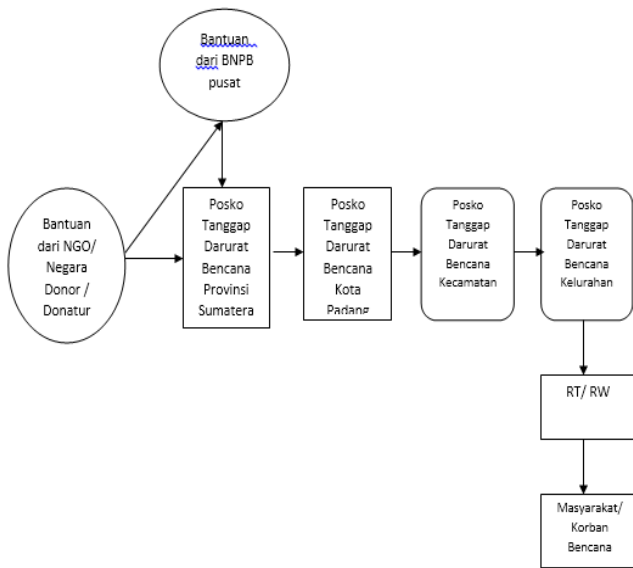
Penelitian tentang mekanisme koordinasi dalam penyaluran bantuan pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Kota Padang dilaksanakan di BPBD Kota Padang dan di dua Kecamatan yang terdapat di Kota Padang, yaitu Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat. Untuk memperoleh informasi mengenai manajemen tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh Kota Padang dalam hal pendataan, pengkoordinasian terhadap penyaluran bantuan pada korban gempa, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif dengan reduksi data.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk musibah gempa yang melanda Sumatera Barat khususnya dalam hal ini Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya dikoordinir oleh BPBD Kota Padang, namun karena akibat dari gempa ini tidak hanya di Kota Padang yang merasakan dampaknya karena ada 11 kabupaten/ Kota di Sumatera Barat yang juga ikut terkena dampaknya dan juga besarnya skala gempa yang terjadi sehingga kerusakan yang ditimbulkan juga sangat besar baik pada korban jiwa maupun dari segi materi. Dan selanjutnya yang memegang Komando Tanggap Darurat Bencana saat itu adalah Satkorlak PB Provinsi yang dijalankan oleh Dinas Kesbanglinmas Pemerintah Provinsi dimana yang dikepalai langsung oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Gamawan Fauzi.

Pada saat masa tanggap darurat bencana gempa tanggal 30 September 2009 untuk wilayah Kota Padang, Pemerintah Kota Padang membentuk komando tanggap darurat bencana khusus wilayah Kota Padang dimana komandannya adalah Bapak Walikota Padang dan langsung bergerak dengan mendirikan posko utama atau pusdalops (pusat pengendalian operasi) di palanta Walikota Padang yang berfungsi untuk menerima dan memberikan informasi kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan masyarakat juga tentunya melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana gempa tersebut, dan seluruh SKPD dan instansi terkait seperti TNI dan Polri berada disana. Dalam pelaksanaan tugas penanganan tanggap darurat bencana, BPBD tetap menjadi koordinatornya BPBD kota Padang dimana Bapak Sekda Kota Padang selaku kepala BPBD Kota Padang, dimana selanjutnya BPBD Kota Padang langsung melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam hal penerimaan dan pengelolaan serta pendistribusian bantuan bencana gempa ke wilayah kecamatan-kecamatan di Kota Padang. Kemudian pada tingkat kecamatan se Kota Padang didirikan pula posko yang berguna untuk memudahkan pendistribusian bantuan. Dari Posko Kecamatan bantuan tersebut didistribusikan ke posko-posko yang ada di setiap kelurahan yang mana akan dibagi oleh petugas Kelurahan ke setiap RT/ RW yang nantinya langsung membagikannya kepada masyarakat yang tertimpa musibah gempa ini.

Alur pendistribusian bantuan bencana gempa 30 September 2009 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang beserta jajarannya dapat dilihat dari gambar alur pendistribusian dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pendistribusian Bantuan Bencana Gempa di kota Padang Pada Masa Tanggap Darurat

Dalam hal penyaluran bantuan kepada korban berjalan dengan baik bencana diatas dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Padang dengan lembaga lainnya baik itu antar lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah. Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan pada Bab II teknik koordinasi dapat berjalan dengan baik jika dalam tahapan proses manajemen bencana pada fase tanggap darurat oleh Pemerintah Kota Padang dengan lembaga lainnya sudah memenuhi kelima teknik dari koordinasi yaitu Koordinasi dalam perencanaan, koordinasi dalam pengorganisasian, koordinasi dalam staffing, koordinasi dalam directing, dan koordinasi dalam pengawasan.

Pelaksanaan koordinasi dalam pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah kota padang antar lembaga lainnya pada masa tanggap darurat bencana dapat dikatakan masih buruk, ini dapat dilihat pada pelaksanaan teknik – teknik koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan dan penyaluran bantuan bencana sebagai berikut ini:

3.1 Koordinasi Dalam Perencanaan

- a. Koordinasi dalam perencanaan terkait pada penanganan dan penyaluran bantuan antara Pemerintah Kota Padang dengan lembaga pemerintahan pada tingkat Pusat dan Provinsi Sumatera Barat masih berjalan lambat dan lemah, hal tersebut disebabkan karena koordinasi lembaga baik ditingkat pusat ataupun di tingkat daerah melakukan perencanaan terkait pada penanganan dan penyaluran bantuan berjalan secara internal lembaga masing – masing, akibat dari tidak adanya koordinasi langsung antara lembaga pemerintah baik pusat dan provinsi dengan pemerintah daerah tingkat Kota Padang menyebabkan banyaknya munculnya kendala dan hambatan dalam penyaluran bantuan, seperti pada kasus tidak mencukupinya bantuan yang disediakan oleh

pemerintah pusat untuk wilayah di Kota Padang, Kemudian selanjutnya kurangnya bantuan transportasi seperti truk – truk yang digunakan untuk pengangkut bantuan bencana sehingga pendistribusian bantuan ke wilayah bencana kurang lancar dan banyak menumpuk di posko tanggap darurat Kota padang, selain itu BPBD Kota Padang belum memiliki Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Padang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana. Protap yang ada masih dalam bentuk usulan skema dan SOP Gempa dan Peringatan Dini Tsunami yang baru akan diajukan kepada Gubernur Sumatera Barat tepat sesaat sebelum terjadinya gempa 30 September 2009.

- b. Koordinasi dalam perencanaan terkait pada penyaluran bantuan dengan NGO/ Donatur memang ada mengurangi sedikit permasalahan akan kekurangan tenaga operasional penyaluran bantuan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana tersebut namun karena kebanyakan dari NGO/ donatur tersebut tidak berkoordinasi dengan Pemerintah kota Padang dalam hal ini BPBD kota Padang dan bergerak sendiri – sendiri dalam hal penyaluran bantuan sehingga mengakibatkan ketidak merataan pembagian bantuan di Kota Padang.
- c. Koordinasi dalam perencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kota padang dengan Kedua Pemerintah kecamatan tersebut sudah berjalan cukup baik, hal tersebut dilihat adanya rapat – rapat tentang penanganan bencana pada masa tanggap darurat antara kedua instansi tersebut. Selanjutnya adanya protap yang telah dihasilkan dari koordinasi perencanaan tersebut, seperti koordinasi dari BPBD Kota Padang yang mengarahkan kepada Intruksi yang sama dalam langkah awal penanganan dan penyaluran bantuan yaitu pendataan jumlah kerusakan dan korban akibat dampak gempa pada tingkat Kecamatan.

3.2 Koordinasi dalam Pengorganisasian

- a. Pada koordinasi dalam pengorganisasian ini terjadi Ketidakserasian antara pemerintah daerah Kota Padang dan Pemerintah Pusat dan begitu juga pada Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kota Padang merupakan suatu SKPD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang dan bukan merupakan organisasi yang secara struktural dibawah BNPB maka fungsi koordinasi terutama dalam hal pendistribusian tugas antara BNPB, Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat dan BPBD akan cenderung sulit dilaksanakan secara efektif, karena BPBD sebagai perangkat daerah akan tunduk kepada Kepala Daerah dan Anggaran Daerahnya masing-masing. Dan BNPB yang merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini dibawah komando dari Presiden RI, begitu juga pada Satkorlak PB Provinsi yang bergerak sesuai intruksi Gubernur Sumatera Barat.

- b. Tidak seluruhnya dan hanya beberapa NGO ataupun Negara Donor yang berkoordinasi langsung dengan BPBD Kota Padang. Dalam hal ini tentunya koordinasi dalam pembagian tugas dan fungsi antar unit-unit organisasi tersebut tidak terjadi, maka tujuan dari koordinasi dalam pengorganisasian tersebut yang mengarahkan masing-masing organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda yang mengarah kepada spesialisasi masing-masing tidak tercapai khususnya dalam hal penyaluran bantuan.
- c. Koordinasi dalam esensi organisasi yang terkait pada pendistribusian tugas dalam hal penyaluran bantuan antara BPBD Kota Padang dengan Pemerintah Kecamatan Padang Utara dan Padang Barat sudah berjalan cukup baik dapat disimpulkan bahwa kedua pemerintah kecamatan tetap dibawah koordinasi BPBD Kota Padang dalam hal intruksi ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak BPBD Kota Padang walaupun Pemerintah Kecamatan tersebut diberikan kewenangan sendiri bebas dalam hal pengkoordinasian dalam hal mekanisme penyaluran bantuan pada wilayah kecamatannya masing – masing sehingga pada pendistribusian tugas terhadap masing – masing unit yang berada dilingkup organisasi setiap pemerintah kecamatan di kota Padang berbeda sesuai dengan kebutuhan kondisi dari wilayah, sumber daya dan juga masyarakatnya pada masa tanggap darurat bencana tersebut.

3.3 Koordinasi Dalam Staffing

- a. Tidak ada koordinasi antara pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penempatan pegawai didalam BPBD Kota Padang. Begitu juga dalam pembentukan tim satuan tugas tanggap darurat bencana gempa bumi 30 september 2009 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 950.A Tahun 2009. Hal tersebut menyebabkan penempatan pegawai pada BPBD Kota Padang tersebut hanya berdasarkan keinginan dan pertimbangan oleh Walikota Padang tanpa pertimbangan terkait kompetensi yang staf yang telah memiliki kecakapan khusus dalam hal penanganan bencana. Ditarik dari garis komandonya tidak ada kewenangan dari BNPB pusat dan Satkorlak PB dalam menempatkan pegawai di BPBD Kota Padang.
- b. Tidak semua dari NGO/ Donatur yang berkoordinasi dengan BPBD Kota Padang, bahkan pada umumnya kebanyakan dari NGO/ Donatur bergerak sendiri – sendiri dalam hal penyaluran bantuan ke lokasi bencana. Dengan demikian koordinasi dalam hal penempatan tenaga personil dari NGO tidak merata dan tidak terpantau oleh BPBD Kota Padang termasuk kegiatan penanganan bencana yang dilakukan oleh NGO/ Donatur tersebut.
- c. Pada pembentukan tim tanggap darurat bencana pada tingkat Kecamatan tetap diserahkan sepenuhnya kepada Camat karena merupakan suatu kewenangan Camat

sebagai pimpinan SKPD pada pemerintah Kecamatan. Sudah barang tentu juga hal tersebut berlaku terkait pada penyaluran bantuan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan. Akibat kekurangan personil atau Sumber Daya Manusia (SDM) karena jumlah pegawai yang ada dilingkungan kecamatan sangat terbatas, ini terlihat pada jumlah pegawai kecamatan Padang Utara yang hanya berjumlah 30 orang dan kecamatan Padang Barat berjumlah 22 orang sehingga proses penyaluran bantuan menjadi tidak optimal.

3.4 Koordinasi Dalam Directing

- a. Koordinasi dalam directing ini dalam penyaluran bantuan bencana antara BPBD Kota Padang dengan Pemerintah Pusat maupun Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat sangat lemah. Terlihat bahwa peran BNPB dalam menyalurkan bantuan bencana hanya sampai kepada Satkorlak Provinsi tanpa ada suatu tim dari BNPB yang memonitor bantuan bencana tersebut sampai kepada korban. Sedangkan Satkorlak PB Provinsi hanya seperti fasilitator saja tidak ada semacam personil ataupun tim dari Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat yang turun langsung dalam penyaluran bantuan pada lokasi bencana gempa tersebut.
- b. Tidak adanya sinergi yang kuat antara NGO/ Donatur dengan pemerintah baik pada tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam hal penanganan bencana ini terutama dalam hal penyaluran bantuan bencana tersebut.
- c. Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan BPBD Kota Padang dalam penyaluran bantuan terkesan memiliki banyak masalah, hal tersebut dapat disimpulkan dikarenakan oleh data yang kurang valid dan lambat dalam dilaporkan ke atas sehingga bantuan yang datang ke Kecamatan tidak sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut memang terkendala kondisi pada sesaat gempa yang masih sulit untuk berkoordinasi dengan baik apalagi kesiapan dan kelengkapan dari BPBD Kota Padang masih kurang dan buruknya sistem kependudukan di Kota Padang, serta kurangnya sosialisasi terhadap persiapan simulasi dalam menghadapi gempa dan tsunami yang dilakukan kepada masyarakat di kota Padang. Merujuk hal tersebut koordinasi dalam directing antara BPBD Kota Padang dengan Pemerintah Kecamatan Padang Utara dan Pemerintah Kecamatan Padang Barat masih lemah.

3.5 Koordinasi Dalam Pengawasan

- a. Koordinasi yang tercipta antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Padang dalam hal koordinasi dalam pengawasan pada penyaluran bantuan bencana yaitu dimana institusi pengawas seperti BPK-RI juga diterjunkan dalam hal melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana di Kota Padang, namun ironis Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana pada saat itu hanya meminta dan menerima laporan penyaluran bantuan, tidak ada upaya

pemantauan yang dilakukan, para personil Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat hanya sibuk membantu pada hal evakuasi korban dan menerima bantuan dari berbagai pihak.

- b. Dalam pengawasan terhadap penyaluran bantuan antara BPBD Kota Padang ada mengikutsertakan beberapa dari NGO ikut serta terlibat langsung dalam hal penyaluran bantuan gempa tersebut pada masa tanggap darurat. Hal tersebut dapat menjaga transparansi penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh pihak BPBD Kota Padang.
- c. Pada pengawasan terhadap bantuan tersebut sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan selain berkoordinasi dengan pejabat yang ada di lingkungan Kota Padang tersebut, BPBD Kota Padang juga berkoordinasi dengan jajaran TNI/Polri, Satpol PP dan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran. Hal tersebut membuat semua aparaturnya terkait dalam hal ini takut untuk berbuat hal – hal yang melenceng dari ketentuan. Namun Pemerintah Kecamatan Padang Utara dan pemerintah Kecamatan Padang Barat didalam koordinasi terkait pada pengawasan dengan NGO/ tim relawan yang masih berjalan kurang baik.

4. Kesimpulan

Secara umum Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang antar lembaga pada masa tanggap darurat bencana dalam hal penanganan dan penyaluran bantuan bencana kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini BPBD Kota Padang selaku koordinator tanggap darurat bencana di Kota Padang dinilai masih buruk, terlihat kebanyakan dari NGO/ donatur tersebut tidak berkoordinasi dengan Pemerintah kota Padang dalam hal ini BPBD kota Padang dan bergerak sendiri – sendiri dalam hal penyaluran bantuan sehingga mengakibatkan ketidakmerataan pembagian bantuan di Kota Padang dan lambannya BPBD Kota Padang dalam meminimalkan dampak bencana tersebut merupakan cerminan ketidakmampuan pemerintah tersebut dalam berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam penanganan dan penyaluran bantuan bencana, sehingga menyebabkan bantuan yang menumpuk di posko utama tanggap darurat Kota Padang, tidak meratanya pendistribusian bantuan diberbagai wilayah di Kota Padang.

Pelaksanaan koordinasi dalam pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah kota padang antar lembaga lainnya pada masa tanggap darurat bencana dapat dikatakan masih buruk, ini dapat dilihat pada pelaksanaan teknik – teknik koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan dan penyaluran bantuan bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diberikan saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait. Bencana gempa telah sering terjadi di Kota Padang, yaitu pada tanggal 6 Maret 2007 dan 30 September 2009, namun dalam penanganannya termasuk dalam hal penyaluran bantuan bencana pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kota Padang selalu sama, yaitu terkesan memiliki koordinasi yang buruk dengan lembaga

terkait lainnya sehingga lambat dalam bertindak. Untuk itu, Pemerintah perlu lebih sering membuat kegiatan dengan bekerjasama dengan NGO/ LSM serta elemen masyarakat lainnya yang telah berpengalaman dalam penanganan bencana serta meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana terkait pada pelaksanaan manajemen bencana tersebut seperti peralatan pendukung penanganan bencana dan pembuatan jalur evakuasi korban bencana. Dengan demikian, pada masa yang akan datang diharapkan penanganan bencana dapat lebih baik.

BPBD Kota Padang tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari instansi/ Lembaga Pemerintah lainnya dan NGO/ Donatur begitu juga sebaliknya terlebih ketika menghadapi situasi darurat bencana ini. Oleh sebab itu untuk masa yang akan datang koordinasi dengan pihak – pihak terkait lebih ditingkatkan dalam penanganan dan penyaluran bantuan darurat bencana mulai dari koordinasi dalam perencanaan, pengorganisasian, staffing, Directing, dan pengawasan seperti mengikutsertakan elemen masyarakat dan NGO dalam melaksanakan setiap kegiatan yang terkait pada koordinasi tersebut. Hal tersebut dapat dikembangkan dengan cara komunikasi timbal balik untuk menciptakan kesatuan bahasa dan kerjasama antara lain melalui rapat-rapat berkala, rapat kerja dan rapat tim. Dengan demikian persoalan mengenai lemahnya koordinasi ini dapat ditanggulangi.

Agar adanya optimal suatu penanganan bencana sebaiknya suatu lembaga penyelenggaraan bencana seharusnya berada pada satu unit departemen dari tingkat daerah sampai ke pusat yaitu mulai dari BNPB, BPBD Tingkat Provinsi, BPBD Tingkat Kota/ Kabupaten sebaiknya dibawah naungan satu departemen saja, hal ini sangat berguna untuk jalannya suatu fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana dan koordinasi dalam hal penanganan dan penyaluran bantuan bencana tidak akan terlalu panjang dengan gaya birokrasi yang berbelit - belit.

Bencana alam seperti gempa bumi ini merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi, dapat datang secara tiba-tiba, oleh sebab itu Pemerintah Kota Padang harus menyiapkan segala sarana dan prasarana yang bersifat penanggulangan, seperti tersedianya alat berat yang dalam kondisi layak pakai, adanya jalur evakuasi serta mensosialisasikan pada masyarakat dan sarana transportasi lainnya, selain itu harus adanya pos dana khusus untuk bencana, dan dana ini tidak boleh diganggu sehingga ketika bencana terjadi, diharapkan pemerintah Kota Padang telah siap menghadapinya.

Selama ini, Pemerintah hanya siap untuk melakukan kegiatan rutinitas pada kondisi normal, namun mereka tidak siap dan gagap dalam kondisi bencana yang memerlukan kecepatan dalam bertindak. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat berfungsi ganda (double track governance sistem) yaitu peraturan yang dapat dilaksanakan pada kondisi normal dan sekaligus dapat dilakukan pada saat tanggap darurat bencana terjadi. Mulai dari peraturan yang mengatur protap tentang sistem keuangan, alur birokrasi yang cepat dan sebagainya. Sehingga para birokrat tidak kuatir dan takut melakukan

kesalahan dalam bertindak apalagi dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPK-RI.

5. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bakornas. (2000). *Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi*, Jakarta
- Carter, W.N. (1991). *Disaster Managemen: A Disaster Manager's Handbook*. Philipines: Asian Development Bank.
- Garry D. (1977). *Managemen Fundamental*, Reston Publishing Company Prentice Hall Company Reston, Virginia
- Goel, S. L. (2006). *Encyclopedia of Disaster Managemet*, Vol. 1: Disaster Management Policy and Administration. New Delhi: Deep & Deep Publication PVT. LTD.
- Kodoatie, R. J. (2006). *Pengelolaan Bencana Terpadu: Banjir, Longsor, Kekeringan dan tsunami*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. (2006). *Badan Penanggulangan Bencana Nasional: Suatu Usulan Tatanan Kelembagaan*, Disampaikan kepada Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Penanggulangan Bencana DPR – RI.Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Parlan, H. (2007). *Merajut Benang Kepedulian (Studi kasus Penyusunan UU Penanggulangan Bencana)*, hal 14. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Jakarta
- Purwanto, E. A. (2005). *“Mamahami Kompleksitas Manajemen Bencana” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Seminar Jurusan Ilmu Administrasi Negara: Manajemen Bencana, Belajar dari Pengalaman Aceh*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sunarto. (2005). *Meminimalkan Dampak Bencana Alam Di Daerah Istimewa Jogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Seminar Jurusan Ilmu Administrasi Negara : Manajemen Bencana, Belajar dari Pengalaman Aceh*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada
- Dadan, Sidaul Anwar. SE, MBA, M.Si, Teknik – Teknik Koordinasi Dalam Organisasi Publik/Kepemerintahan. UNHCR, 1997, Buku Pegangan Kedaruratan
- Pemerintah Kota Padang. (2009). *Padang Barat Dalam Angka 2008*, BPS Kota Padang
- Pemerintah Kota Padang. (2009). *Padang Utara Dalam Angka 2008*, BPS Kota Padang
- BPK RI. (2010). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Kegiatan Penanganan Bencana gempa Bumi Untuk Masa Tanggap Darurat untuk*
- Pemerintah Kota Padang Pada tahun Anggaran 2009, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Bpk Ri Provinsi Sumatera Barat
- BNPB. (2008). *Himpunan Peraturan Perundangan tentang Penanggulangan Bencana*, Jakarta Kompas edisi Jumat, 12 Februari 2010, Buruknya Manajemen Penanganan Bencana. hal 3
- Harian pagi Padang Ekspres, edisi Minggu 4 Oktober 2009, Bantuan Gempa Tersedat di BIM. Hal 1
- Haluan, edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2009. Bantuan Korban Gempa belum terdistribusikan dengan baik, hal 3
- Padang Ekspres, edisi Jumat, tanggal 2 Oktober 2009. Koordinasi Lemah, Evakuasi Lamban, hal 3
- Padang Ekspres, edisi Minggu, tanggal 4 Oktober 2009. Sejarah Panjang Gempa di Padang, hal, 4